

PENGUKURAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Zaula Rizqi Atika, Ali Rokhman, Muslih Faozanudin¹

zaulakiki@gmail.com

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRAK

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pengukuran kemiskinan yang digunakan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pengukuran kemiskinan yang digunakan di Kabupaten Banyumas. Dutta dan Kumar (2013: 496) memandang bahwa mengukur suatu kemiskinan perlu dikaitkan dengan kepemilikan aset fisik dan aset manusia. Aset fisik yang dimaksud meliputi kepemilikan fasilitas rumah tangga, jenis bangunan rumah, sumber air minum, fasilitas toilet, bahan bakar memasak, aset produktif dan aset alam. Aset manusia terdiri dari riwayat pendidikan, keberadaan serta kesehatan ibu hamil/menyusui dan status kesehatan anggota rumah tangga terhadap penyakit kronis. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan pada penelitian adalah *purposive*. Lokasi penelitian dilaksanakan di BPS, Dinsosnakertrans dan Bapermas-PKB Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) dianggap paling sesuai dan mendekati realitas di Kabupaten Banyumas berdasarkan aspek kepemilikan aset fisik serta aset manusia. Hasil pengukuran kemiskinan BPS mikro mencakup hampir seluruhnya dari enam sub aspek aset fisik diantaranya kepemilikan fasilitas rumah tangga, jenis bangunan rumah yang dimiliki, penggunaan sumber air minum rumah tangga, jenis toilet yang dimiliki, bahan bakar memasak yang digunakan serta kepemilikan aset alam, kecuali kepemilikan aset produktif. Sedangkan tiga sub aspek aset manusia seluruhnya meliputi riwayat pendidikan yang dimiliki suatu rumah tangga, keberadaan serta kesehatan ibu hamil dan menyusui, status kesehatan anggota rumah tangga terhadap penyakit kronis lengkap dimiliki pada pengukuran kemiskinan BPS mikro.

Kata kunci: Aset, Kabupaten Banyumas, Pengukuran Kemiskinan

¹ Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

The problems that arise in this research is how the measurement of poverty used in Banyumas. This study aims to determine the accuracy of the measurement of poverty used in Banyumas Regency. Dutta and Kumar (2013: 496) considers that a poverty measure needs to be associated with the ownership of physical assets and human assets. Physical assets may include ownership of household facilities, types of houses, sources of drinking water, toilet facilities, cooking fuel, productive assets and natural assets. Human assets consist of educational history, existence and health of pregnant/ breastfeeding and the health status of household members against chronic diseases. The study was conducted with a qualitative approach. Informant selection techniques used in the study was purposive. Location of the study conducted at BPS (Central Statistics Agency), Dinsosnakertrans (Social, Employment and Transmigration Services) and Bapermas-PKB (Agencies of Community Development, Women and Family Planning) of Banyumas Regency. The results showed that the measurement of poverty versions of the Central Statistics Agency (BPS) is considered the most appropriate and closer to the reality in Banyumas based aspects of the ownership of physical assets and human assets. The results of poverty measurement BPS micro covers almost entirely of six sub aspects of physical assets including ownership of household facilities, types of houses that are owned, use drinking water source of household, type of toilet that is owned, cooking fuel used and the ownership of natural assets, except ownership productive assets, while three sub aspects of human assets entirely covers education history owned by a household, the existence and health of pregnant and lactating women, the health status of household members to complete the chronic disease have on the measurement of micro BPS poverty.

Keywords: asset; Banyumas regency; poverty measurement

A. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai pengukuran kemiskinan sering kali terjadi dengan berbagai alasan. Hal tersebut dikarenakan lingkup kajian ini bersifat multidimensi. Diduch (2012: 99) menyatakan bahwa pengukuran kemiskinan terkadang mengundang kontroversi serta memiliki unsur politik. Keberadaan pengukuran kemiskinan begitu penting dan rumit, perdebatan metode yang tepat untuk mengukur kemiskinan mencakup banyak rincian teknis meliputi skala kesetaraan, pendapatan, dan penyesuaian geografis. Suatu pengukuran kemiskinan menurut Ravallion (Badrudin, 2012:595) justru dijadikan sebagai alat pertimbangan pada

pembuatan kebijakan berkaitan dengan kondisi hidup orang miskin. Mac Cárthaigh (2014: 459) menyoroti adanya hubungan antara kebutuhan dan kemiskinan, dimana kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk memiliki atau melakukan tidak kurang dari orang lain. Sedangkan miskin merupakan posisi tidak memiliki sarana untuk melakukan atau menjadi sesuatu.

Pengukuran kemiskinan dianggap sebagai upaya mengubah kehidupan antar generasi. O'Connor (2014: 26) menyikapi perubahannya bukan hanya pada lingkup kehidupan orang miskinnya saja, tetapi struktur lembaga ekonomi, politik, sosial dan budaya perlu dirancang lebih baik lagi. Empat alasan disampaikan oleh *World Bank* (2005: 8) mengapa perlu melakukan pengukuran kemiskinan dalam suatu strategi penanggulangan kemiskinan yakni pertama, perlunya menjaga agenda kemiskinan yang bertujuan agar orang miskin tidak mudah terlupakan. Kedua, sebagai identifikasi target dalam upaya mengurangi kemiskinan. Ketiga, memantau dan mengevaluasi program kebijakan pro-kemiskinan. Terakhir, mengevaluasi efektivitas lembaga yang berkaitan tentang kemiskinan. Sedikit berbeda dengan Sen (1976: 219) yang mengungkapkan dua permasalahan krusial pada proses pengukuran kemiskinan diantaranya identifikasi orang miskin diantara total penduduk dan membangun indeks kemiskinan menggunakan informasi dari masyarakat miskin tersebut. Beberapa poin dari Ansoms (2012: 599) tentang pengukuran kemiskinan dikaitkan dengan urusan politik maupun pembangunan, bahwasanya pengukuran kemiskinan sebenarnya tidak hanya dinilai berdasarkan segi aset, tetapi juga dikaitkan dengan kekuasaan, kesempatan, peluang, pengaruh, kemampuan dan kapabilitas.

Penyelesaian pengukuran kemiskinan tidak sesederhana sebatas mengatasi masalah pendapatan. Tanpa mencoba berdamai dengan korban ketidakadilan struktural sepertinya belum maksimal. Terdapat lima hal menurut Alkire dan Foster (2011: 312) yang dapat diperhatikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan antara lain, (i) keselamatan, keamanan dan penegakan hukum, (ii) transparansi serta korupsi, (iii) partisipasi dan hak asasi manusia, (iv) peluang ekonomi yang berkelanjutan dan (v) pembangunan manusia. Misurelli dan Heffernan (2010: 54) menganggap bahwa seseorang yang dianggap miskin adalah

mereka yang mengalami kekurangan serta kerentanan tidak hanya dilihat dari aset material, tetapi juga untuk berbagai faktor yang membuat hidupnya tidak layak dijalani. Jadi, orang miskin digambarkan dengan seseorang yang kehilangan sarana materi untuk bertahan hidup. Tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan serta hak juga merupakan bagian dari kehilangan sarana materi untuk bertahan hidup.

Dutta dan Kumar (2013: 496) berkeyakinan bahwa dalam suatu pengukuran kemiskinan diperlukan adanya kepemilikan aset fisik dan aset manusia. Aset fisik yang dimaksud meliputi kepemilikan fasilitas rumah tangga, jenis bangunan rumah, sumber air minum, fasilitas toilet, bahan bakar memasak, aset produktif dan aset alam. Adapun aset manusia diantaranya terdiri dari riwayat pendidikan, keberadaan serta kesehatan ibu hamil/menyusui dan status kesehatan anggota rumah tangga terhadap penyakit kronis. Seiring perkembangan jaman, kepemilikan aset banyak dijadikan sebagai alat untuk mengukur kemiskinan. Beberapa negara telah menerapkan sistem kesejahteraan berbasis aset sejak lama, seperti yang disampaikan Decker dan Dewilde (2010: 243) kebanyakan lansia pada beberapa negara termasuk dalam kondisi miskin karena memiliki pendapatan rendah terutama yang berasal dari pensiunan pemerintahan tetapi diantara mereka memiliki kekayaan aset. Leonard dan Di (2014: 132) mengungkapkan tidak hanya rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah yang dianggap miskin karena kesulitan mengakses aset-aset tertentu, namun rumah tangga berpendapatan tinggi pun sebenarnya berpotensi untuk menjadi miskin misalnya karena kehilangan pekerjaan, rumah, bisnis dan investasi. Pentingnya keberadaan suatu aset dijabarkan oleh Filmer dan Scott (2012: 359) bahwasanya terdapat peningkatan penggunaan indikator aset pada analisis kesejahteraan serta kemiskinan. Dua point penting yang perlu diperhatikan saat mengukur tingkat kesejahteraan yaitu pertama, sejauh mana pengeluaran diamati dari karakteristik rumah tangga. Kedua adalah sejauh mana pengeluaran didominasi oleh barang-barang individual. Indikator aset biasanya berupa barang-barang yang berasal dari tingkatan rumah tangga. Keberadaan aset pada rumah tangga menjadi penentu penting dari pendapatan jangka panjang. Hal tersebut mempengaruhi peluang seseorang untuk

mengakses pendidikan, kepemilikan rumah, bisnis serta pencapaian aspirasi ekonomi. Huang *et al* (2013: 764) mengkategorikan rumah tangga miskin adalah posisi dimana mereka yang kesulitan untuk mengakses beberapa jenis aset dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu upaya awal keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah terwujudnya suatu ketepatan dalam pengukuran kemiskinan. Kabupaten Banyumas termasuk salah satu daerah yang memiliki imbas kompleksitas dari fenomena kemiskinan. Keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan salah satunya dengan tercapainya ketepatan sasaran penerima program. Ketepatan sasaran dapat terwujud dari konsep serta pengukuran kemiskinan yang baik. Mengkonsep dan mengukur suatu kemiskinan akan memberikan pengaruh pada dasar kebijakan program penanggulangan kemiskinannya. Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah dengan indikator yang berbeda. Kabupaten Banyumas termasuk salah satu daerah yang memiliki imbas kompleksitas dari fenomena pengukuran kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengukuran kemiskinan yang digunakan di Kabupaten Banyumas? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pengukuran kemiskinan yang digunakan di Kabupaten Banyumas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan pada penelitian adalah *purposive*. Lokasi penelitian dilaksanakan di BPS (Badan Pusat Statistik), Dinsosnakertrans (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan Bapermas-PKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana) Kabupaten Banyumas. Sasaran penelitian terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten mengenai pengukuran kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif, terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Salah satu langkah penting dalam suatu penelitian adalah teknik pengumpulan data. Tujuan utamanya agar mendapatkan

data sesuai standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang dimaksud diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi. Upaya untuk mendapatkan data yang valid diperlukan adanya penggunaan model triangulasi. Adapun model triangulasi yang dipilih yaitu triangulasi sumber. Fokus penelitian ini mengacu pada pengukuran kemiskinan, kemudian dikaitkan melalui dua aset pentingnya yakni fisik serta manusia. Aset fisik diantaranya meliputi kepemilikan fasilitas rumah tangga, jenis rumah, sumber air minum, fasilitas toilet, bahan bakar memasak, aset produktif dan aset alam. Aset manusia terdiri dari riwayat pendidikan, keberadaan serta kesehatan ibu hamil/menyusui dan status kesehatan anggota rumah tangga terhadap penyakit kronis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengukuran Kemiskinan Versi BPS

Menurut analisis data kemiskinan BPS tahun 2012, jumlah penduduk miskin versi pengukuran BPS makro diperoleh melalui pendekatan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan atau disebut juga pendekatan moneter. Kriteria dalam menentukan penduduk miskin versi pengukuran BPS makro adalah mereka yang pengeluarannya berada dibawah garis kemiskinan maka dianggap sebagai orang miskin. Garis kemiskinan merupakan nilai dari pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan per kapita per bulan. Batas kecukupan pada makanan disebut dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM), terdiri dari 52 komoditi dasar makanan yang sering dikonsumsi meliputi beras, gula pasir, telur ayam ras, dan lain-lain. Nilai pengeluaran dari paket komoditi tersebut kemudian disetarakan menjadi 2.100 kilokalori per kapita per hari. Angka tersebut dijadikan standar minimum untuk makanan memadai yang harus dikonsumsi oleh seseorang dalam sehari. Komponen berikutnya yaitu dinilai berdasarkan status Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penjumlahan nilai kebutuhan minimum komoditi non makanan mencakup pengeluaran diantaranya untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama, serta barang dan jasa esensial lainnya.

Penghitungan jumlah penduduk miskin versi pengukuran BPS mikro menggunakan pendekatan non moneter. Pengukuran kemiskinan BPS mikro yang

mampu menyediakan data mengenai rumah tangga miskin sampai dengan nama dan alamatnya. Versi pengukuran kemiskinan BPS mikro mengklasifikasikan rumah tangga miskin menjadi empat kondisi diantaranya sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin lainnya. Adapun beberapa hal yang dijadikan standar dalam pengukuran kemiskinan mikro meliputi keterangan umum Anggota Rumah Tangga (ART) terdiri dari nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kecacatan, dan penyakit kronis. Keterangan selanjutnya diukur berdasarkan standar perumahan berupa status kepemilikan rumah, luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, daya terpasang, bahan bakar energi untuk memasak, penggunaan fasilitas buang air besar, tempat pembuangan tinja serta aset yang dimiliki.

2. Pengukuran Kemiskinan Versi Dinsosnakertrans

Pada prinsipnya hasil dari suatu pembangunan diharapkan dapat memberikan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan dimasyarakat baik secara sosial, ekonomi maupun budaya, namun faktanya sering kali kesejahteraan tersebut tidak dapat diakses oleh segelintir masyarakat. Sesuai dengan buku profil PMKS Kemensos tahun 2011, disampaikan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga maupun kelompok masyarakat yang mengalami hambatan serta gangguan dalam melaksanakan fungsi sosial sehingga menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan hidup baik jasmani, rohani dan sosial secara normal. Hambatan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Kriteria penentuan PMKS dikaitkan melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup makanan pokok, lauk pauk dan pakaian, kemudian pemenuhan kebutuhan sosial berupa pendidikan dasar, tempat tinggal, keluhan kesehatan, derajat ketelantaran, keberadaan ayah kandung (khusus PMKS golongan anak-anak). Pentingnya tujuan menciptakan suatu kondisi kesejahteraan sosial yakni agar terpenuhinya kebutuhan material,

spiritual dan warga negara dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri untuk melaksanakan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya.

3. Pengukuran Kemiskinan Versi Bapermas-PKB

Pada buku profil hasil pendataan keluarga BKKBN tahun 2013 dijelaskan sebagaimana kesejahteraan suatu rumah tangga dalam setiap kabupaten diklasifikasikan menjadi lima tingkatan diantaranya Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus. Tingkatan keluarga pra sejahtera dimaknai sebagai keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan keluarga sejahtera I. Adapun tingkatan keluarga sejahtera I yaitu mereka yang baru dapat memenuhi indikator-indikator seperti (1) kesempatan anggota keluarga untuk makan dua kali sehari atau lebih, (2) anggota keluarga memiliki pakaian berbeda selama di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, (3) rumah mempunyai atap, lantai, dinding yang baik, (4) kemampuan membawa anggota keluarga sakit ke sarana kesehatan, (5) kemampuan pasangan usia subur untuk mendapatkan fasilitas KB di sarana pelayanan kontrasepsi, (6) semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tingkatan keluarga sejahtera II adalah mereka yang sudah dapat memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I (indikator 1 s/d 6) ditambah indikator berikut, (7) anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, (8) minimal seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur, (9) seluruh anggota keluarga mampu membeli minimal satu pasang pakaian baru dalam setahun, (10) luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah, (11) tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, (12) terdapat seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, (13) seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis, (14) pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya tingkatan keluarga sejahtera III merupakan mereka yang sudah memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II (indikator 1 s/d 14) ditambah indikator berikut, (15) keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, (16) sebagian penghasilan

keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang, (17) kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi, (18) keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, (19) keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv. Terakhir, tingkatan keluarga sejahtera III plus yaitu mereka yang memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II dan keluarga sejahtera III (indikator 1 s/d 19) ditambah indikator berikut, (20) keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial, (21) terdapat anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

4. Pengukuran Kemiskinan di Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas merilis jumlah penduduk miskin berdasarkan tiga versi yakni BPS makro dan mikro, Dinsosnakertrans serta Bapermas-PKB. Terdapat tiga perbedaan data jumlah penduduk miskin berdasarkan versi BPS yang terdiri dari pengukuran kemiskinan makro atau sering disebut Susenas serta pengukuran kemiskinan mikro atau PPLS, kemudian versi Bapermas-PKB diantaranya terbagi menjadi keluarga pra-sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, keluarga sejahtera III plus dan terakhir versi Dinsosnakertrans. Tabel berikut dipaparkan perbedaan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas dari ketiga lembaga tersebut pada tahun 2013:

Tabel 1. Matrik Perbedaan Jumlah Penduduk Miskin Banyumas 2013

No.	Nama Lembaga	Jumlah Penduduk Miskin				
1.	BPS Makro (Susenas)	296,8 ribu orang				
	BPS Mikro (PPLS 2011)	239.002 orang				
		Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin Lainnya	
		27.194	42.750	67.717	101.341	
2.	Bapermas-PKB	474.174 orang				
		PS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus
		110.741	92.946	126.337	110.080	34.070
3.	Dinsosnakertrans					

		135.420 orang
--	--	---------------

Sumber: Hasil Analisis Lapangan dari BPS, Bapermas-PKB & Dinsosnakertrans

Pada tahun 2013, BPS Makro atau Susenas merilis jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas sebesar 296,8 ribu orang, kemudian versi BPS mikronya atau PPLS tahun 2011 mempunyai jumlah 239.002 rumah tangga miskin yang terdiri dari kategori sangat miskin sebanyak 27.194, miskin 42.750, hampir miskin 67.717 dan rentan miskin lainnya 101.341. Bapermas-PKB mengeluarkan jumlah penduduk miskin tahun 2013 berdasarkan lima tingkatan kesejahteraan dengan total 474.174 keluarga meliputi 110.741 dari keluarga pra-sejahtera, 92.946 keluarga sejahtera I, 126.337 keluarga sejahtera II, 110.080 keluarga sejahtera III, serta 34.070 keluarga sejahtera III plus. Terakhir, Dinsosnakertrans merilis jumlah penduduk miskin versi PMKS tahun 2013 sebanyak 135.420 orang. Perbedaan ketiga versi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas dikarenakan adanya perbedaan standar pengukuran kemiskinan milik BPS, Dinsosnakertrans dan Bapermas-PKB. Perbedaan standar pengukuran kemiskinan tersebut menghasilkan kriteria penentuan penduduk miskin secara berbeda pula. Hal inilah yang akhirnya menjadi penyebab perbedaan jumlah penduduk miskin diantara ketiga lembaga.

Keberadaan Dutta dan Kumar (2013: 496) dapat dikatakan sebagai wujud akumulasi indikator pengukuran kemiskinan yang telah dipaparkan sebelumnya dari milik BPS, Dinsosnakertrans dan Bapermas-PKB dikaitkan atas dasar kepemilikan aset baik berupa fisik maupun manusia. Aset fisik yang dimaksud meliputi kepemilikan fasilitas rumah tangga, jenis rumah, sumber air minum, fasilitas toilet, bahan bakar memasak, aset produktif dan aset alam. Aset manusia terdiri dari riwayat pendidikan, keberadaan serta kesehatan ibu hamil/menyusui dan status kesehatan anggota rumah tangga terhadap penyakit kronis. Berikut adalah hasil pengukuran kemiskinan dikaitkan dengan keberadaan aset fisik serta aset manusia di Kabupaten Banyumas:

Matrik Hasil Pengukuran Kemiskinan Berbasis Aset di Kabupaten Banyumas					
No	Indikator Pengukuran	BPS		Dinsos- nakertrans	Bapermas- PKB
		Makro	Mikro		

Aset Fisik					
1.	Kepemilikan fasilitas rumah tangga	V	V	V	V
2.	Jenis rumah yang dimiliki	V	V	V	V
3.	Penggunaan sumber air minum	V	V	-	V
4.	Kepemilikan jenis toilet	V	V	-	V
5.	Pemilihan bahan bakar memasak	V	V	-	V
6.	Kepemilikan aset produktif	-	-	-	-
7.	Kepemilikan aset alam	-	V	-	V
Aset Manusia					
1.	Riwayat pendidikan	V	V	V	V
2.	Keberadaan serta kesehatan ibu hamil/ menyusui	-	V	V	V
3.	Status kesehatan rumah tangga terhadap penyakit kronis	-	V	V	-

Sumber: Hasil Analisis Lapangan Tahun 2015

Dapat diperiksa bahwa BPS, Dinsosnakertrans serta Bapermas-PKB memiliki persamaan pengukuran kemiskinan pada aspek aset fisik berupa kepemilikan fasilitas rumah tangga dan jenis rumah yang dimiliki. Adapun persamaan pengukuran kemiskinan dari aspek aset manusia hanya mencakup dalam riwayat pendidikan suatu anggota rumah tangga. Persamaan lainnya adalah BPS, Dinsosnakertrans serta Bapermas-PKB tidak menjadikan aset produktif sebagai acuan dalam standar pengukuran kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

Pengukuran kemiskinan milik Dinsosnakertrans memiliki beberapa perbedaan dengan dua instansi lainnya yaitu BPS serta Bapermas-PKB. Dinsosnakertrans tidak menjadikan sebagian dari aspek aset fisik seperti kepemilikan sumber air minum, toilet, bahan bakar memasak dan aset produktif sebagai acuan dalam standar pengukuran kemiskinan. Perbedaan lainnya adalah BPS Makro dan Dinsosnakertrans tidak menjadikan kepemilikan aset alam, keberadaan serta kesehatan ibu hamil/ menyusui dan status kesehatan rumah tangga terhadap penyakit kronis sebagai acuan dalam standar pengukuran kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum kemiskinan dipandang tidak hanya sebatas ukuran moneter, tetapi mencakup pula miskin secara nutrisi misalnya jika dikaitkan dengan terhambatnya pertumbuhan anak. Miskin pendidikan misalnya dihubungkan pada banyaknya kasus buta huruf. Pandangan lebih luas lagi mengenai kemiskinan yakni apabila masyarakat kekurangan kemampuan dasar atas pendapatan, kesehatan, rasa tidak aman dan tidak adanya hak bebas berpendapat. Dengan demikian dari hasil pembahasan pengukuran kemiskinan ketiga lembaga tersebut, BPS merupakan lembaga yang dianggap paling sesuai dan mendekati realitas di Kabupaten Banyumas berdasarkan aspek kepemilikan aset fisik serta aset manusia. Hasil analisis pengukuran kemiskinan BPS mikro paling lengkap, mencakup hampir seluruhnya dari enam sub aspek aset fisik kecuali kepemilikan aset produktif, kemudian tiga sub aspek aset manusia seluruhnya dimiliki oleh pengukuran BPS mikro. Pada kenyataannya, BPS makro, Dinsosnakertrans dan Bapermas-PKB belum menerapkan aspek aset fisik maupun aset manusia secara maksimal dalam pengukuran kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Terdapat perbedaan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas versi BPS, Dinsosnakertrans dan Bapermas-PKB. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengukuran kemiskinan dari ketiga lembaga, sehingga menyebabkan adanya perbedaan kriteria penentuan penduduk miskin. Keberadaan aset fisik meliputi kepemilikan fasilitas rumah tangga, jenis rumah, sumber air minum, fasilitas toilet, bahan bakar memasak, aset produktif dan aset alam maupun aset manusia berupa riwayat pendidikan, keberadaan serta kesehatan ibu hamil/menyusui dan status kesehatan anggota rumah tangga terhadap penyakit kronis adalah wujud akumulasi dari pengukuran kemiskinan yang telah ada di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hal tersebut, maka kesimpulan yang diambil bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang dianggap paling sesuai dan mendekati realitas di Kabupaten Banyumas berdasarkan aspek kepemilikan aset fisik serta

aset manusia. Hasil pengukuran kemiskinan BPS mikro mencakup hampir seluruhnya dari enam sub aspek aset fisik kecuali kepemilikan aset produktif, sedangkan tiga sub aspek aset manusia seluruhnya lengkap dimiliki pengukuran kemiskinan BPS mikro.

2. Saran

Secara praktis, diperlukan penerapan aspek aset fisik maupun aset manusia secara maksimal dalam ukuran kemiskinan pada BPS makro, Dinsosnakertrans dan Bapermas-PKB di Kabupaten Banyumas. Pada ranah studi administrasi publik, penelitian ini secara teoritis menghasilkan catatan bahwa pengukuran kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banyumas masih memberikan kesan kuatnya ego sektoral masing-masing lembaga pelaksana pengukuran kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari adanya kepentingan-kepentingan setiap lembaga khususnya terkait pengukuran kemiskinan yang tidak bisa diganggu gugat. Padahal kemiskinan diketahui sebagai permasalahan kompleks serta multidimensional karena mempunyai keterlibatan berbagai pihak. Administrasi Negara sendiri mempunyai komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (*social equity*). Lembaga pelaksana pengukuran kemiskinan diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan serta dapat memberikan pelayanan publik secara merata.

Pengukuran kemiskinan dalam lingkup nasional seharusnya diberikan wadah khusus serta dibuat indikator kemiskinan secara *uniform* bagi lembaga-lembaga seperti BPS, Kemensos dan BKKBN. Indikator yang bersifat sentralistik juga diperlukan, mengingat keberadaan indikator yang seragam dan terpusat ini bertujuan salah satunya agar menghindari adanya ketidaktepatan sasaran pemberian program penanggulangan kemiskinan. Adapun wadah khusus yang dimaksud misalnya dengan pembentukan organisasi *superbody* semacam “Komisi Kependudukan” layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatukan lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Keberadaan ketiga lembaga seperti BPS, Kemensos dan BKKBN memiliki kepentingan sama kuatnya, diperlukan organisasi untuk mengkoordinir serta mengendalikan masalah kependudukan khususnya terkait penduduk miskin.

Sedikit berbeda dengan pengukuran kemiskinan dalam lingkup pemerintah daerah, diperlukan indikator khusus bersifat desentralistis terkait pengukuran kemiskinan berbasis *locality* untuk Kabupaten Banyumas. Pada prinsipnya, kemiskinan merupakan realitas sosial yang sebenarnya hanya mereka yang mengalami kemiskinan sendirilah yang mengerti betul tentang apa sebenarnya kemiskinan itu. Unsur budaya juga diperlukan sebagai pelengkap indikator pengukuran kemiskinan. Upaya menciptakan indikator khusus terkait pengukuran kemiskinan berbasis *locality* untuk Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menysasar kepada orang-orang yang tepat. Dimana nantinya penciptaan indikator kemiskinan lokal lebih melibatkan orang-orang yang dianggap miskin oleh ketiga lembaga yakni BPS, Dinsosnakertrans dan Bapermas-PKB.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, Sabina and James Foster. 2011. *Understandings and Misunderstandings of Multidimensional Poverty Measurement*. J Econ Inequal (2011) 9:289–314.
- Ansoms, An. 2012. *Negotiating On Poverty: A Participatory Poverty Assessment Simulation Game*. 2012 SAGE Publications. 44(4) 586–601.
- Badrudin, Rudy and Ari Waroka. 2012. *Poverty Measurement and Choice of Poverty Reduction Strategy: The Importance of Poverty Measurement in Determining the Right Strategy*. Journal of Economics and Behavioral Studies Vol. 4, No. 10, pp. 595-602.
- Decker, Pascal De and Caroline Dewilde. 2010. *Home ownership and asset based welfare: the case of Belgium*. J Hous and the Built Environ (2010) 25:243–262.
- Diduch, Amy Mc Cormick. 2012. *Using the Consumer Expenditure Survey to Teach Poverty Measurement*. The Journal of Economic Education, 43 (1), 99–106.
- Dutta, Swati and Laksmi Kumar. 2013. *Poverty Dynamics in Rural India: An Asset-Based Approach*. The Journal of Applied Economic Research: 475–506
- Filmer, Deon and Kinnon Scott. 2012. *Assessing Asset Indices*. Demography (2012) 49:359–392.
- Huang, Jin *et al.* 2013. *Asset Poverty in Urban China: A Study Using the 2002 Chinese Household Income Project*. Jnl Soc. Pol. (2013), 42, 4, 763–781. Cambridge University Press.

Leonard, Tammy and Wenhua Di. 2014. *Is Household Wealth Sustainable? An Examination of Asset Poverty Reentry After an Exit*. J Fam Econ Iss (2014) 35:131–144. Science+Business Media New York.

Mac Cárthaigh, Seosamh. 2014. *Need and poverty*. Journal Policy & Politics, Vol 42, Number 3, 459-73.

Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. Sage Publications

Misturelli, Federica and Claire Heffernan. 2010. *The Concept of Poverty: A Synchronic Perspective*. Progress in Development Studies 10, pp. 35–58.

Moleong, L.J., 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

O'Connor, Alice. 2014. *Poverty and Paradox*. The Hedgehog Review.

Sen, Amartya. 1976. *Poverty: An Ordinal Approach to Measurement*. Econometrica. Volume 44. Number 2.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Analisis Data Kemiskinan Kementerian Sosial Untuk BPS Tahun 2012.

Profil Hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2013.

Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Indonesia Tahun 2011.

World Bank. 2005. *Introduction to Poverty Analysis*. World Bank Institute.